

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Tujuan dari KTTA ini yaitu mengetahui penurunan atau peningkatan Capaian Kinerja beserta masalah yang menyebabkannya pada Kanwil DJPB Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 dan 2021. Berdasarkan tujuan tersebut dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, diperoleh simpulan sebagai berikut:

- a. Hasil implementasi penilaian IKU LAKIN pada Kanwil DJPB Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 dan 2021 menandakan adanya kepatuhan dan kesesuaian terhadap ketentuan yang berlaku dan mengindikasikan adanya kenaikan Nilai Kinerja Organisasi. Namun demikian kenaikan NKO tidak diiringi dengan meningkatnya semua indikator kinerja.
 - Terdapat 6 indikator kinerja yang mengalami penurunan, diantaranya Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L, Nilai kinerja pelaksanaan pembinaan dan supervisi Kanwil DJPb terhadap KPPN, Persentase akurasi perencanaan kas, Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization, Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas

kepatuhan internal, Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil DJPb.

- Kemudian terdapat 8 indikator kinerja yang mengalami peningkatan realisasi diantaranya Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil DJPb, Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program, Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil DJPb, Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi, Rata-rata nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada KPPN, Nilai kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah, Nilai rata-rata hard competency pegawai, Tingkat kualitas pengelolaan BMN.

- b. Penurunan realisasi yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, masih adanya pandangan apabila target tercapai tidak diperlukan pembahasan sehingga belum menyentuh pada tingkat kualitas pencapaiannya; kurangnya bukti dukung atas kinerja yang dilakukan; adanya kejadian luar biasa berupa pandemi Covid-19 yang mengakibatkan berbagai layanan dilaksanakan secara online bahkan ditunda/dibatalkan dan tentunya berpengaruh langsung terhadap penyerapan anggaran dan pelayanan publik. Sementara itu, kenaikan realisasi didukung dengan adanya monitoring dan evaluasi dari realisasi masa lampau dalam hal ini realisasi tahun anggaran sebelumnya.